

ANALISIS DAYA SAING DAERAH ANTAR KECAMATAN KOTA PEKANBARU

Supriadi Hutabarat¹⁾, Wahyu Hamidi²⁾, Sri Endang Kornita²⁾

1) Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

2) Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

Email : 082362734000s@gmail.com

Analysis of Regional Competitiveness Between Districts in Pekanbaru City

ABSTRACT

This study aims to determine the competitiveness of institutional variables, socio-politics, regional economies, productivity and labor and physical infrastructure. This is to determine the level of competitiveness between kecamatan in Pekanbaru City. This type of descriptive quantitative research. The population in this study were all people who were in the workforce age, namely 15 - 65 years and living in Pekanbaru City with a total population of 513,271 people. A sample of 12 people. The results of this study indicate that the regional competitiveness between districts that has the highest percentage of the regional economic variable is Sail sub-district. Furthermore, the physical infrastructure variable for Sail sub-district. Then for the variables of labor and productivity in Sail and Lima Puluh districts. Next, the institutional variables are Fifty and in the socio-political variables are in the Lima Puluh district. The ranks of the highest to lowest sub-districts are Payung Sekaki, Sail and Lima Puluh Subdistricts. This is due to the high contribution of Payung Sekaki, Sail and Fifty sub-districts in the fields of agriculture and processing industry. As the center of government for Payung Sekaki, Sail and Lima Puluh sub-districts, they have a high level of competitiveness, but what makes the region the second highest region is that good infrastructure is not accompanied by natural resources. Meanwhile, in terms of human resources, the ranking looks good

Keywords: *Regional Economy, Physical Infrastructure, Labor and Productivity, Institutional, Socio-Political, Regional Competitiveness*

PENDAHULUAN

Daya saing merupakan kemampuan yang dimiliki suatu daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, daya saing adalah interaksi yang kompleks antara faktor input (sebagai faktor utama pembentuk daya saing) dan output (inti dari kinerja perekonomian, yaitu meningkatkan

kesejahteraan masyarakat) yang ada di daerah masing-masing.

Kondisi ini membuka kesempatan seluas-luasnya bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kemakmuran masyarakatnya melalui inovasi, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta menciptakan tata kelola ekonomi ke arah yang lebih kompetitif dan berdaya saing tinggi.

Pembentukan berdaya tentu tidak hanya mencakup upaya untuk memperkuat sinergi berbagai sektor pembangunan daerah, tetapi juga mencakup penyempurnaan secara structural dalam system pembangunan daerah agar pembangunan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat secara lebih efektif dan efisien.

Peran daerah untuk meningkatkan daya saingnya sangat tergantung kepada kemampuan daerah untuk melakukan indentifikasi faktor pembentuk dan penentu daya saing daerah. Dengan kemampuan daerah yang cermat dalam melakukan indentifikasi faktor-faktor pembentuk dan penentu daya saing maka daerah dapat menyusun strategi menetapkan kebijakan-kebijakan apa yang harus tempuh agar daya saing daerahnya dapat terus meningkat. Daya saing daerah bertujuan untuk memberikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yaitu mengembangkan sektor unggulan sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tingkat persaingan antar daerah dari waktu ke waktu semakin tinggi sebagai dampak dari munculnya fenomena globalisasi ekonomi. Suatu daerah akan memiliki reaksi yang berbeda dalam menyikapi dampak dari adanya fenomena globalisasi ini, hal tersebut akan sangat menentukan posisi tawar masing-masing daerah dalam persaingan global yang semakin ketat. (Melia, 2019)

Globalisasi ini tidak hanya akan berdampak pada perekonomian Provinsi Riau secara keseluruhan, tetapi juga akan berdampak langsung pada perekonomian daerah terlebih lagi setelah desentralisasi fiskal. Sementara itu, instrumen utama dalam

pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah pendanaan atas penyerahan urusan kepada daerah yang proporsioanal, adil, demokratis, dan transparan dengan memperhatikan potensi dan kebutuhan daerah. Pelaksanaan deesentralisasi fiskal bermakna pada mengelola keuangan secara efektif, efisien, dan akuntabel guna mendukung pelayanan publik. Serasi dalam menyelenggarakan hubungan antar tingkat pemerintah, baik antar daerah maupun antar pusat dan daerah.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan desentralisasi fiskal, peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan otomi daerah meliputi keseleraan dan keserasian. Selaras memberikan pelayanan dan meningkatkan peran serta, prakarsa, dan memperdayakan masyarakat yang memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat.

Untuk meningkatkan daya saing dan menciptakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, Konsistensi kebijakan pro-investasi, penggalan inovasi, penetrasi teknologi, eksplorasi sektor unggulan dan industri kreatif perlu terus dipacu. Upaya tersebut perlu diiringi dengan penguatan peran Pemda untuk menjaga stabilitas perekonomian makro mikro khususnya pada prioritas peningkatan kualitas SDM, derajat kesehatan masyarakat, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur serta pemantapan kualitas kelembagaan.

Daerah Kota mempunyai peranan strategis dalam pembangunan wilayah yang mempunyai hubungan ke belakang dengan kota-kota kecil dan hinterlandnya dan juga hubungan ke belakang dengan kota-kota besar lainnya. Meskipun sumber daya alam

yang tersedia di Perkotaan terbatas, namun kota yang berfungsi sebagai pusat produksi barang dan jasa harus mampu memberikan pelayanan yang kompetitif. Kota juga sebagai pasar yang potensial untuk melayani kebutuhan penduduknya dengan daya beli yang cukup tinggi, disamping kemampuannya mendistribusikan barang dan jasa ke daerah lain (Santoso, 2009). Perekonomian daerah sebagai salah satu variabel daya saing perlu ditekankan khusus demi pembangunan daerah yang berkelanjutan. Perekonomian daerah juga akan menentukan bagaimana tingkat kesejahteraan.

Kemampuan Daerah untuk meningkatkan daya saingnya akan sangat tergantung pada kemampuan Daerah dalam mengenali dan menentukan faktor-faktor pendorong daya saing dan juga kemampuan Daerah dalam menetapkan kebijakan ekonomi yang difokuskan untuk dapat mendorong transformasi dan akselerasi pertumbuhan ekonomi regional. Kecamatan kota Pekanbaru, secara administratif terdiri atas dua belas kecamatan yaitu Bukit Raya, lima Puluh, Marpoyan Damai, Payung Sekaki, Pekanbaru Kota, Rumbai, Rumbai Pesisir, Sail, Senapelan, Sukajadi, Tampan, Tenayan Raya dengan 268 desa/kelurahan. Luas wilayah 632,27 km². Kota Pekanbaru diperluas dari ±62,96 km² menjadi ±446,50 km², terdiri dari 12 kecamatan dan 83 kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran atau pematokan dilapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah kota Pekanbaru adalah 632,26 km².

Potensi kekuatan ekonomi kota Pekanbaru tidak hanya dari sumber daya alam (SDM), namun juga sumber daya manusia sebagai faktor produksi.

Oleh sebab itu, SDM yang banyak dan berkualitas merupakan investasi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di kota Pekanbaru secara signifikan. Dengan adanya dukungan peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan, akan berdampak pada peningkatan produktivitas tenaga kerja dan peningkatan daya saing.

Pembangunan masyarakat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu perlu melihat indikator lain untuk mendapatkan gambaran bagaimana pembangunan masyarakat yang dilakukan di kota Pekanbaru. Adapun indikator yang akan dilihat adalah indeks pembangunan manusia (IPM) di kota Pekanbaru. Kesejahteraan masyarakat diperoleh dari pengembangan wilayah yang dilakukan dengan cara pembangunan yang berkelanjutan. Konsep pembangunan berkelanjutan saat ini sudah menjadi tujuan dalam pembangunan dan pengembangan kota/kabupaten di Indonesia. Salah satu alat ukur konsep kota yang berkelanjutan adalah tingkat daya saing antara wilayah. Semakin tinggi daya saing suatu kota, maka semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakatnya. Beberapa variabel yang diukur dalam pengukuran tingkat daya saing adalah variabel perekonomian daerah, variabel infrastruktur dan sumber daya alam, serta variabel sumber daya manusia.

Lemahnya kualitas manusia terutama tenaga kerja, akan berdampak pada lambannya pertumbuhan ekonomi. Karena hubungan pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi yang bersifat saling keterkaitan. Hasil survei angkatan kerja nasional (Sakernas) 2015 menunjukkan bahwa tingkat

pendidikan di wilayah kota pekanbaru tidak menyebar secara merata, terutama dibagian perbatasan kota Pekanbaru. Untuk itu pemerintah kota Pekanbaru diharapkan dapat memasarkan daerahnya dengan baik.

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) dalam penelitiannya pada tahun 2013 menjelaskan bahwa pemasaran daerah menjadi suatu pendekatan yang populer sebagai instrument penting untuk memperkuat perekonomian daerah dan daya saing global. Pemasaran daerah dijadikan instrumen dalam bidang pembangunan ekonomi local dan ekonomi regional (*Local dan Regional Economic Deveplopment/RED*) dalam rangka menghadapi tantangan globalisasi yang meghasilkan persaingan yang semakin ketat antara wilayah dan masing-masing daerah. Kemampuan daerah menjual potensi yang dimiliki suatu daerah adalah faktor penting keberhasilan pemasaran daerah. Kemampuan untuk menjual tersebut juga harus didukung oleh terciptanya iklim yang kondusif dan mendukung investasi di daerah seperti ada jaminan keamanan dan kepastian hukum bagi investasi di daerah. Pemda hendaknya mampu melahirkan regulasi yang dapat memacu pertumbuhan perekonomian dengan merebut investor PMA dan PMDN sekaligus memperdayakan investor lokal. Keberhasilan Pemda mengelola faktor-faktor tersebut akan dapat mendorong peningkatan daya saing daerah dalam merebut investor.

Kendala lain dalam performa ekonomi Kota Pekanbaru adalah tingginya angka kemiskinan. Penduduk miskin di Kota Pekanbaru sebanyak 494.260 jiwa. Jumlah ini merupakan 7,21 persen dari jumlah

total penduduk pada september 2018. Pertumbuhan ekonomi yang dibutuhkan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin adalah pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Investasi sebagai penyumbang pertumbuhan harus dilakukan dalam bentuk mempercepat industrilisasi pertanian/perdesaan dan akumulasi modal manusia melalui pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan dan perbaikan infrastruktur pedesaan (modal fisik). Hal ini membutuhkan campur tangan pemerintah dan partisipasi swasta secara signifikan.

Keberadaan dan berkelanjutan pemerintahan daerah menuntut penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat efisien, efektif, ekonomis, dan produktif. Artinya, diperlukan sinergisitas dan khosesitas antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk bersama-sama mengeksplorasi dalam koridor peraturan perundang-undangan, sehingga terjadi percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah yang signifikan menuju terwujud masyarakat sejahtera. Transformasi dan akselerasi pembangunan haruslah bertumbuh pada penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan sosial politik, peningkatan kapasitas SDM dan produktivitas, meningkatkan daya saing daerah yang pada gilirannya daya saing nasional (bangsa) juga turut meningkat.

Untuk mendapatkan tingkat Daya Saing Dari Kota Pekanbaru dibandingkan dengan kota lain-lain di Provinsi Riau maupun tingkat daya saing kota Pekanbaru yang dibentuk oleh kemampuan daya saing kecamatan-kecamatan didalamnya,

maka perlu adanya suatu “Analisis Daya Saing Daerah Antar Kecamatan Di Kota Pekanbaru”.

TINJAUAN PUSTAKA

Daya Saing Daerah

Centre for Urban and Regional Studies (CURDS) mendefinisikan daya saing daerah sebagai kemampuan sektor bisnis atau perusahaan pada suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan yang tinggi serta tingkat kekayaan yang lebih merata untuk penduduknya (Abdullah, 2002:24).

Dalam mendefinisikan daya saing perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Daya saing mencakup aspek yang lebih luas dari sekedar produktivitas atau efisiensi pada level mikro. Hal ini memungkinkan kita lebih memilih mendefinisikan daya saing sebagai “kemampuan suatu perekonomian” daripada “kemampuan sektor swasta atau perusahaan”.
2. Pelaku ekonomi (*economic agent*) bukan hanya perusahaan, akan tetapi juga rumah tangga, pemerintah, dan lain-lain. Semuanya terpadu dalam suatu sistem ekonomi yang sinergis. Tanpa memungkiri peran besar sektor swasta perusahaan dalam perekonomian, fokus perhatian tidak hanya pada itu saja. Hal ini diupayakan dalam rangka menjaga luasnya cakupan konsep daya saing.
3. Tujuan dan hasil akhir dari meningkatnya daya saing suatu perekonomian tak lain adalah meningkatnya tingkat kesejahteraan penduduk di dalam perekonomian tersebut.

Kesejahteraan (*level of living*) adalah konsep yang maha luas pasti tidak hanya menggambarkan dalam sebuah besaran variabel seperti pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi hanya satu aspek dari pembangunan ekonomi dalam rangka peningkatan standar kehidupan masyarakat.

Indikator Utama Daya Saing Daerah

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Abdullah, 2002 dengan judul Daya Saing Daerah Konsep dan Pengukurannya di Indonesia indikator penentu daya saing daerah adalah Perekonomian Daerah, Keterbukaan, Sistem Keuangan, Infrastruktur dan Sumber Daya Alam, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Sumber Daya Manusia, Kelembagaan, *Governance*, dan kebijakan pemerintah, dan Manajemen dan Ekonomi Makro.

Indikator-indikator utama yang dianggap menentukan daya saing daerah adalah (I) Perekonomian daerah, (II) Keterbukaan, (III) Sistem keuangan, (IV) Infrastruktur dan sumber daya alam, (V) Ilmu pengetahuan dan teknologi, (VI) Sumber daya manusia, (VII) Kelembagaan, (VIII) *Governance* dan Kebijakan Pemerintah, dan (IX) Manajemen dan Ekonomi mikro.

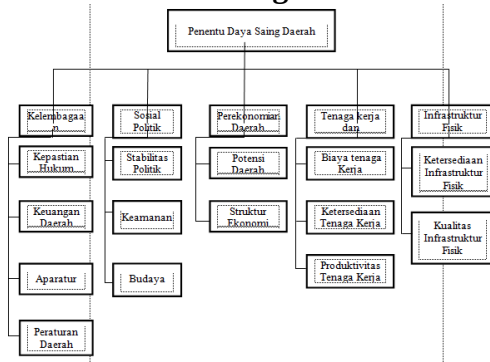
Kerangka Pemikiran

Sebagai kabupaten pemekaran masih terdapat banyak masalah perekonomian. Untuk membentuk daerah yang berdaya saing kita terlebih dahulu mengukur potensi yang dimiliki sehingga arah pembangunan menjadi terarah. Perencanaan pembangunan suatu

daerah haruslah disesuaikan dengan potensi yang dimiliki daerah bersangkutan dan inilah kunci keberhasilan program pengembangan pembangunan daerah.

Perencanaan pembangunan itu harus mempertimbangkan Infrastruktur, sumber daya manusia, sumber daya alam yang dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi daerah tersebut agar mampu bersaing dengan daerah lain sekitarnya. Dari uraian diatas maka dapatlah disusun suatu skema sebagai berikut:

Gambar 1 Kerangka Pemikiran



Hipotesis

Dalam penelitian ini dapat diajukan hipotesis sebagai berikut: kelembagaan, Sosial Politik, Perekonomian Daerah, Tenaga Kerja dan Produktivitas, Infrastruktur Fisik mempengaruhi daya saing daerah kecamatan di Kota Pekanbaru.

METODELOGI PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Pekanbaru dengan ruang lingkup penelitian berupa identifikasi daya saing antar kecamatan. Kecamatan tersebut yaitu, Bukit Raya, Lima Puluh, Marpoyan Damai, Payung

Sekaki, Pekanbaru Kota, Rumbai, Rumbai Pesisir, Sail, Senapelan, Sukajadi, Tampan, Tenayan Raya yang penelitiannya dimulai bulan September –November 2019.

Responden

Responden dalam penelitian ini sebanyak 12 orang yang terdapat di 12 Kecamatan Kota Pekanbaru. Responden terdiri dari camat dan DPRD Kota Pekanbaru. Responden ditentukan berdasarkan metode purposive sampling. Dimana yang dijadikan sebagai key informan merupakan orang-orang yang expert pada focus penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk melengkapi data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, baik data utama maupun data pendukung, baik data yang bersifat primer maupun sekunder.

Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam menganalisis daya saing ekonomi Kota Pekanbaru pada tahun 2019 meliputi analisis deskriptif dan *Analytical Hierarchy Proses* (AHP) dengan bantuan software yaitu *expert choice*.

HASIL PENELITIAN

Karakteristik Responden

Jumlah responden yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 7 orang (53.85%) sedangkan responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 6 orang (46.15%). Terdapat 2 responden (15.38%) dengan kisaran umur di bawah atau sama dengan 30 tahun, 7 responden (53.85%) dengan kisaran umur 30-39 tahun, 4 responden (30.77%) dengan kisaran

umur di atas atau sama dengan 39 tahun. Berdasarkan tabel 5.2 diatas dapat diambil kesimpulan bahwa responden terbanyak berada kisaran umur 30-39 tahun dengan 7 responden, sedangkan responden yang paling sedikit berada pada kisaran umur antara di bawah atau sama dengan 30 tahun dengan 2 responden.

Terdapat 1 responden (7.69%) yang tamat SMA, 1 responden (7.69%) dengan pendidikan Diploma, kemudian 8 responden (61.54%) dengan tingkat pendidikan Sarjana, sedangkan responden yang menempuh pendidikan sampai ke tingkat magister terdapat 3 responden (23.08%).

Terdapat 1 responden (7.69%) bekerja sebagai camat, 10 responden (76.92%) bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara sedangkan 1 responden (7.69%) bekerja sebagai staff dan 1 responden (7.69%) bekerja sebagai anggota DPRD Kota Pekanbaru.

Pembobotan dan Pemeringkatan Variabel Daya Saing Daerah Antar Kecamatan di Kota Pekanbaru

Bobot paling tinggi pada variabel kelembagaan berada pada kecamatan Senapelan dan Pekanbaru Kota dengan bobot sebesar 0,124, serta Kecamatan Lima Puluh sebesar 0.105. Sebaliknya bobot terendah pada variabel kelembagaan adalah Tampan dan Marpoyan Damai sebesar 0.026.

Dalam variabel sosial politik bobot tertinggi berada pada kecamatan Bukit Raya sebesar 0,110, Kecamatan Tenayan Raya sebesar 0.105, Kecamatan Lima Puluh sebesar 0.116. Kemudian untuk bobot daya saing paling rendah berada pada kecamatan Marpoyan Damai sebesar 0,017.

Selanjutnya variabel perekonomian daerah kecamatan yang memiliki bobot paling tinggi berada pada

kecamatan Marpoyan Damai sebesar 0.124 dan Kecamatan Sukajadi sebesar 0.124. Sebaliknya yang terendah berada pada kecamatan Senapelan sebesar 0,047. Kemudian pada variabel tenaga kerja dan produktivitas bobot tertinggi di kecamatan Payung Sekaki sebesar 0.100, Kecamatan Lima Puluh sebesar 0.111. Sedangkan bobot yang terendah berada pada Kecamatan Tampan 0,058.

Berikutnya variabel infrastruktur fisik bobot tertinggi berada pada kecamatan Tampan sebesar 0,230. Bobot terendah pada kecamatan berada pada 0.126, Kecamatan Marpoyan Damai sebesar 0.102, Kecamatan Pekanbaru Kota sebesar 0.126 dan Kecamatan Sukajadi sebesar 0.102. Sedangkan bobot yang terendah berada di Kecamatan Bukit Raya dan Rumbai sebesar 0.047.

Pemeringkatan Daya Saing Daerah Antar Kecamatan Dengan Menggunakan Metode Borda

Tabel 1 Hasil Pemeringkatan Daya Saing Antar Kecamatan di Kota Pekanbaru Tahun 2020

No	Kecamatan	Peringkat					Rangking	Bobot	Hasil BORDA
		Kelembagaan	Sosial	Perekonomian	Produktivitas	Infrastruktur			
1	Tenayan Raya	6	6	5	5	4	57	0.088	5.01
2	Bukit Raya	6	7	6	5	3	58	0.091	5.31
3	Rumbai	7	3	6	5	3	52	0.082	4.28
4	Payung Sekaki	5	5	4	6	6	47	0.074	3.50
5	Tampan	2	7	4	4	8	38	0.059	2.22
6	Marpoyan Damai	2	1	8	6	7	32	0.050	1.80
7	Sail	6	5	6	4	6	53	0.083	4.39
8	Rumbi	5	5	6	4	4	51	0.080	4.06
9	Senapelan	8	4	3	6	6	56	0.087	4.84
10	Pekanbaru Kota	8	5	6	6	8	66	0.103	6.80
11	Sukajadi	7	5	8	5	7	62	0.097	6.07
12	Lima Puluh	7	7	6	7	4	68	0.106	7.22
		4	3	2	1	0	640	1.000	640.33

Sumber: Olahan Data Primer (2020)

Berdasarkan Hasil pemeringkatan Tabel 1 di peroleh Kecamatan yang mempunyai daya saing paling tinggi adalah Payung Sekaki, Sail dan Lima Puluh pada bidang kelembagaan, sosial politik, perekonomian,

produktivitas dan tenaga kerja, serta infrastruktur sedangkan yang paling rendah adalah Kecamatan Bukit Raya, Rumbai, Tampan, Marpoyan Damai, Rumbai Pesisir, Senapelan, Pekanbaru Kota dan Sukajadi.

PEMBAHASAN

1. Peringkat Daya Saing Berdasarkan Variabel Perekonomian Daerah

Potensi ekonomi tertinggi meskipun persentase daya saing perekonomian daerah kecamatan Sail dan Payung Sekaki berada pada kategori sedang, akan tetapi pada indikator potensi ekonomi berada pada tingkat kepentingan yang paling tinggi diantara kecamatan yang lainnya. Berikutnya untuk indikator struktur ekonomi daya saing yang paling tinggi berada pada kecamatan Sail dengan persentase sebesar 58 persen.

Ekonomi Riau triwulan I-2019 tumbuh 2,88 persen (y-on-y), lebih baik dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar 2,84 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh hampir semua lapangan usaha kecuali Pertambangan dan Penggalian. Pertumbuhan tertinggi dicapai lapangan usaha Jasa Lainnya yang tumbuh 8,39 persen. Perekonomian Riau triwulan I-2019 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 184,51 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 120,37 triliun. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha, kecuali pada lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian yang mengalami kontraksi sebesar minus 3,56 persen. Jasa lainnya merupakan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 8,39 persen, diikuti

oleh Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 7,75 persen, dan Industri Pengolahan sebesar 6,31 persen.

Dari perkembangan diatas dapat dikatakan bahwa Kota Pekanbaru sebenarnya sangat mampu untuk meningkatkan daya saing daerahnya jika potensi-potensi ekonomi tersebut dikelola dengan sangat baik oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dan seluruh elemen masyarakat. Dengan pengelolaan yang optimal dan konsisten serta berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat diharapkan akan tercipta Kota Pekanbaru yang berdaya saing tinggi.

2. Pemeringkatan Daya Saing Berdasarkan Variabel Infrastruktur

Salah satu infrastruktur strategis yang perlu ditingkatkan kualitasnya untuk menunjang perekonomian yang berdaya saing tinggi adalah kualitas kondisi jalan. Berdasarkan kondisinya jalan di Kota Pekanbaru kondisi rusak sedang 14.5 km, kondisi rusak ringan 1.69 km, kondisi rusak berat 0.55 km. Ruas jalan kota Pekanbaru-Kampar kondisi rusak sedang 0.60 km, kondisi rusak ringan 0.10km, kondisi rusak berat 15.97 km. jalan Kota Pekanbaru-Siak kondisi rusak sedang 3.30 km, kondisi rusak ringan 0.10 km, kondisi rusak berat 7.14 km.

Dengan kondisi demikian, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar infrastruktur fisik di Kota Pekanbaru kondisinya masih belum cukup baik, perlu peningkatan kualitas jalan raya. Sebaiknya yang menjadi perhatian pemerintah Kota Pekanbaru adalah pembangunan jalan secara merata di seluruh kecamatan yang ada, dengan begitu

akses jalan yang menghubungkan antar desa atau kelurahan di Kota Pekanbaru dapat berjalan dengan baik. Selain itu terlaksananya pembangunan jalan tol Pekanbaru Dumai.

3. Daya Saing Berdasarkan Variabel Produktivitas dan Tenaga Kerja

Peringkat daya saing kecamatan indikator variabel tenaga kerja dan produktivitas dari yang tertinggi sampai yang terendah. Dalam indikator ketersediaan tenaga kerja yang paling tinggi di kecamatan Rumbai Pesisir 58 persen. Sebaliknya yang paling rendah berada pada kecamatan Bukit Raya, Rumbai, Tampan masing-masing 1 persen. Kemudian indikator produktivitas tenaga kerja yang tertinggi berada pada kecamatan Sail dan Sukajadi 7 persen. Berikutnya pada indikator biaya tenaga kerja yang memiliki daya saing tinggi adalah kecamatan Sail dan Sukajadi sebesar 7 persen dan yang paling rendah bobot tingkat kepentingannya kecamatan Bukit Raya, Rumbai, Payung Sekaki, Tampan, Rumbai Pesisir, Senapelan, Pekanbaru yang masing-masing sebesar 1 persen.

Jumlah angkatan kerja Provinsi Riau pada Februari 2019 sebesar 3,30 juta orang, tidak mengalami perubahan yang signifikan dibanding Februari 2018. Penduduk bekerja di Provinsi Riau pada Februari 2019 sebanyak 3,11 juta orang, meningkat 5 ribu orang dibanding kondisi Februari 2018. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2019 sebesar 5,57 persen, turun dari 5,72 persen pada Februari 2018.

Berdasarkan analisis dan persepsi dari responden, produktivitas tenaga kerja diharapkan untuk lebih baik lagi

sehingga dapat meningkatkan daya saing ekonomi Kota Pekanbaru. Mengenai ketersediaan tenaga kerja, jumlah angkatan kerja di Kota Pekanbaru melebihi dari kebutuhan pasar tenaga kerja sehingga menimbulkan tingkat pengangguran terbuka di Kota Pekanbaru pada tahun 2019 sekitar 3.864 sedang mencari pekerjaan

4. Peringkat Daya Saing Berdasarkan Variabel Kelembagaan

Peringkat indikator kepastian hukum yang tertinggi berada pada kecamatan Payung Sekaki, Sail dan Lima Puluh dengan persentase 7 persen. Sedangkan tingkat kepentingan yang paling rendah berada pada kecamatan Bukit Raya, Rumbai, Tampan, Senapelan dan Pekanbaru Kota dengan persentase tingkat kepentingan 1%.

Dalam indikator pembiayaan pembangunan kecamatan yang memiliki tingkat kepentingan yang paling tinggi adalah Lima Puluh dengan persentase masing-masing 7 persen. Sebaliknya yang paling rendah berada pada kecamatan Bukit Raya, Rumbai, Tampan, Sail, Senapelan, Pekanbaru Kota dengan persentase tingkat kepentingan 1%.

Selanjutnya dalam indikator aparatur yang tertinggi kepentingan daya saingnya berada pada kecamatan Lima Puluh 7 persen dari keseluruhan jumlah indikator. Berikutnya pada indikator peraturan daerah persentase tertinggi di Kecamatan Payung Sekaki dan Lima Puluh 7 persen. Sedangkan yang paling rendah berada pada kecamatan Bukit Raya, Rumbai, Payung Sekaki, Tampan, Senapelan, Pekanbaru Kota dengan persentase tingkat kepentingan 1%.

Hal ini mengindikasikan bahwa responden berharap adanya kepastian hukum yang kuat dan jelas terutama kepastian dalam perlindungan usaha seperti perizinan usaha yang mudah tanpa adanya pungli, konsistensi penegakan hukum terhadap perlindungan pelaku usaha, dan juga keamanan dalam melakukan kegiatan usaha. Kemudian dalam hal pembiayaan pembangunan yang transparan seperti jumlah APBD yang sesuai dengan realisasi pembangunan di Kota Pekanbaru dimana dalam hal ini pemerintah Kota Pekanbaru dituntut harus bertindak tegas terhadap kemungkinan

penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam merealisasikan pembangunan di Kota Pekanbaru.

Variabel kelembagaan ini beradadibawah kendali pemerintahan daerah. Dimana pemerintah daerah menentukan arah kebijakan agar terciptanya suatu keadaan yang baik agar dapat menjadi daya tarik para investor untuk berinvestasi. Karena keberhasilan suatu kelembagaan di nilai ketika dapat memberikan pelayanan yang baik, dapat menetapkan suatu peraturan dengan benar serta mampu bersikap tegas atas pelanggaran yang dilakukan.

5. Pemingkatan Daya Saing Berdasarkan Variabel Sosial Politik

Tingkat indikator daya saing daerah variabel sosial politik. Berdasarkan jumlah persentase kecamatan dengan indikator stabilitas politik dari tingkat tertinggi adalah Sail dan Lima Puluh 7 persen kemudian untuk yang paling rendah Bukit Raya, Rumbai, Payung Sekaki,

Tampan, Rumbai Pesisir, Senapelan, Pekanbaru Kota dan Sukajadii dengan nilai sebesar 1 persen. Selanjutnya untuk indikator keamanan daya saing paling tinggi adalah kecamatan Lima Puluh7 persen, kemudian yang paling rendah Kecamatan Bukit Raya, Payung Sekaki, Sail, Rumbai Pesisir, Senapelan dan Pekanbaru Kota dengan persentase 1 persen. Selanjutnya pada indikator budaya yang paling tinggi berada pada kecamatan Tampan, Sail dan Lima Puluh dengan Persentase sebesar 7 persen. Sedangkan untuk tingkat kepentingan daya saing terendah berada pada kecamatan Bukit Raya, Marpoyan Damai, Senapelan dan Pekanbaru Kota1 persen.

Dari keseluruhan variabel sosial politik diatas, secara keseluruhan, faktor stabilitas politik, keamanan dan budaya dianggap kurang diperhatikan untuk menjadi penentu daya saing daerah Kota Pekanbaru.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang dilakukan dari bab 1 sampai bab 5, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Daya saing daerah antar kecamatan yang memiliki persentase tertinggi pada variabel perekonomian daerah adalah kecamatan Sail. Selanjutnya variabel infrastruktur fisik kecamatan Sail. Kemudian untuk variabel tenaga kerja dan produktivitas kecamatanSail dan Lima Puluh. Berikutnya pada variabel kelembagaan Lima Puluhdan dalam variabel sosial politik berada pada kecaamatan Lima Puluh.

2. Peringkat kecamatan yang tertinggi hingga yang terendah adalah Kecamatan Payung Sekaki, Sail dan Lima Puluh hal ini disebabkan oleh tingginya kontribusi kecamatan Payung Sekaki, Sail dan Lima Puluh dalam bidang pertanian serta industri pengolahan. Sebagai pusat pemerintahan kecamatan Payung Sekaki, Sail dan Lima Puluh memiliki tingkat daya saing yang cukup tinggi akan tetapi yang membuat daerah menjadi daerah tertinggi kedua adalah Infrastruktur yang baik tidak dibarengi oleh sumber daya alamnya. Sedangkan pada sumber daya manusianya terlihat bagus peringkatnya. Sebagai Kecamatan dapat diakses hanya melalui jalur darat membuat kecamatan ini memiliki daya saing terendah di Kota Pekanbaru, untuk infrastruktur dikecamatan cukup baik akan tetapi perlu dilakukan peningkatan kualitas infrastruktur agar kecamatan ini dapat mengejar ketertinggalan dari daerah di sekitarnya.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang dilakukan dari bab 1 sampai bab 5, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Untuk mempercepat pembangunan daerah di Kota Pekanbaru, pemerintah diharapkan dapat memberikan perhatian khusus bagi daerah yang memiliki daya saing terendah di Kota Pekanbaru serta pemerataan pembangunan infrastruktur dengan kualitas yang baik.
2. Untuk penelitian selanjutnya disarankan melakukan penelitian tentang daya saing setiap desa antar kecamatan di Kota Pekanbaru.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, P, Alisjahbana, Armida, S., Effendi, N., Boediono, 2002. *Daya Saing Daerah, Konsep dan Pengukurannya di Indonesia*, Edisi 1, BPFE, Yogyakarta.
- Alisjahbana, Armida, S. 2012. *Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millennium di Indonesia*. BAPPENAS 2011. Jakarta
- Anggaritha H, Guswandi, Utami Nabila Dety Novia. 2018. *Prioritas Pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti*. Majalah Geografi Indonesia Vol 32 (2) hal 198-206.
- Bappenas, 2009. *Pedoman Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektoral*, Jakarta: Kedeputan Evaluasi Kinerja Pembangunan.
- Bardi, Diviya. 2016. Analisis Daya Saing Ekonomi Kota Tebing Tinggi. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*. Vol 3, No 7hal: 479-489.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. 2015. *Keadaan Angkatan Kerja Dalam Angka 2015*.Pekanbaru.

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Meranti. (2017). "Transportasi dan komunikasi Kabupaten Kepulauan Meranti. Tebing Tinggi.
- . 2016. *Data Kemiskinan Kabupaten Kepulauan Meranti*. Tebing Tinggi.
- Delgado, M., Christian K., Porter, M.E., dan Stern, S. 2012. *The Determinants of National Competitiveness. National Bureau of Economic Research. Working Paper No. 18249*
- Djajasudarma, T. Fatimah. 2006. *Metode Linguistik: Rancangan Metode Penelitian dan Kajian*. Eresco. Bandung
- Fatimah. Tengku Siti. 2015. Analisis Daya Saing Ekonomi Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal ekonomi dan Keuangan*. hal: 45-56.
- Halwani, R Hendra, 2002, *Ekonomi Internasional dan Globalisasi Ekonomi*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Huda, Miftahul. 2014. *Pengembangan Daya Saing Daerah Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Timur Berdasarkan Potesi Daerahnya. Jurnal Teknik POMITS*. Vol (2). Hal C81-C86.
- Huseini, Martani. Otonomi Daerah, Integrasi Bangsa, dan Daya Saing Nasional: Saka-Sakti, Suatu Model Alternatif pemberdayaan Ekonomi Daerah (orasi Ilmiah Wisuda XIX STIA LAN Bandung, tanggal 29 April 2000)
- Irawati, Ira., Zulfadly Urufi, Renato Everardo Isaias ., Rezza Resobeoen, Agus Setiawan, Aryanto, 2008. "Pengukuran Tingkat Daya Saing Daerah Berdasarkan Variabel Perekonomian Daerah, Variabel Infrastruktur dan Sumber Daya Alam, Serta Variabel Sumber Daya Manusia di Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara", Prosiding INSAHP, Semarang.
- Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah. 2005. *Daya Saing Investasi Kabupaten/Kota di Indonesia, 2005*. Jakarta. KPPOD.
- KPPOD, 2005. *Daya Tarik Investasi 214 Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2004*, KPPOD, Jakarta
- Lubis, Muhammad Sefti Arif. 2015. Analisis Daya Saing Ekonomi Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*. Vol 3 (1). Hal 16-28.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Erlangga, Jakarta
- Marpaung, Z. Surya. 2012. E-Government dan Strategi Pemanfaatan Pemasaran Potensi Sumber Daya Alam Daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(1), hal: 23-31.

- Maizunati, Nur Afiyah. 2016. Mempertahankan Daya Saing Kota Magelang Dengan Mendongkrak Potensi Perekonomian Makro. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*. Vol 14 (1). Hal: 47-55.
- Millah, Anita Nur. 2013. Analisis Daya Saing Daerah di Jawa Tengah: Studi Kasus: Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Surakarta, Kota Magelang, Kota Pekalongan, dan Kota Tegal Tahun 2009-2011. *Diponegoro Journal of Economics*. Vol. 3(1).hal: 1-8
- Nasution, Evita Khairani. 2015. Analisis Daya Saing Kota Tanjung Balai. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*. Vol 3 (2). 72-88.
- Nusantoro, Jawoto. 2011. Model Pengembangan Produk Unggulan Daerah Melalui Pendekatan Klaster di Provinsi Lampung. Seminar Nasional Ilmu Ekonomi Terapan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Metro, Lampung.
- Prianti, Paicakra. 2014. Analisis Daya Saing Ekonomi di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*. Vol 3 (6). Hal: 421-435.
- Puspita, Chris Wijayanti., Farida Rachmawati., Hadi Sumarsono. 2017. Strategi Peningkatan Daya Saing Wilayah Pengembangan Satu Kabupaten Malang. *Jurnal Pendidikan*. Vol 2(3), hal: 392-399.
- Taniredja, Tukiran dan Hidayati Mustafidah. 2011. *Penelitian Kuantitatif Sebuah Pengantar*. Alfabeta, Bandung.
- Ritonga. Suci Ana Winata. 2014. Analisis Daya Saing Ekonomi Kabupaten Batubara. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*. Vol 3 (5). Hal 323-334.
- Saaty, Thomas L, 1993. *Decision Making For Leader :The Analytic Hierarchy Process For Decision in A Complex World*, University of Pittsburgh, Pittsburgh.
- Saksosno, Herie. 2012. Ekonomi Kreatif: Talenta Baru Pemicu Daya Saing Daerah. *Jurnal Bina Praja*. Vol 4(2), hal:93-104.
- Siregar, Hermanto, Dwi Wahyuniarti. 2006. *Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin*. Institut Pertanian Bogor. Bogor. Hal: 38.
- Suparmoko, M. 2012. *Ekonomi Publik Untuk Keuangan Dan Pembangunan Daerah*. Andi Offset, Yogyakarta.
- Susanto, A. dan N. Nowanti. 2008. Analisis Sektor Potensial Dan Pengembangan Wilayah Guna Mendorong Pembangunan di Kabupaten Rembang. *Media Ekonomi dan Manajemen*, 18 (2), Hal: 153-164.